



LAPORAN AKHIR PENELITIAN
HIBAH FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Tahun Usulan 2019, Tahun Pelaksanaan 2020

1. Judul *)

Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Pasca Pilkada

2. Topik *)

Sosial Humaniora

3. Bidang Ilmu *)

Politik

4. Identitas Peneliti *)

Peran	Nama	Sinta ID / NIM	Fakultas	Bidang Studi
Ketua Pengusul	Dr. Lusi Andriyani, SIP.,M.Si	6020076	FISIP	Ilmu Politik
Anggota Dosen 1	Djoni Gunanto, SIP., M.Si	6690000	FISIP	Ilmu Politik
Anggota Dosen 2	M.Sahrul, S.Sos.,M.Si	6698035	FISIP	Kesos
Anggota Mhs 1	Kallies Restu Widhyastuti	2017130022	FISIP	Ilmu Politik

5. Pengesahan Usulan Proposal *)

Tanggal Pengajuan	Tanggal Persetujuan	Pimpinan Pemberi Persetujuan	Jabatan	Lembaga/Fakultas
14 Februari 2020	14 Februari 2020	Dr. Usni, M.Si	Kaprodi	Ilmu Politik

Tanggal Pengajuan	Tanggal Persetujuan	Pimpinan Pemberi Persetujuan	Jabatan	Lembaga/Fakultas
14 Februari 2020	14 Februari 2020	Dr. Ma'mun Murod, M.Si	Dekan	FISIP

*Note : *) jangan diisi/dirubah*

6. Riwayat Penelitian Ketua Pengusul *)

{riwayat}

Riwayat Penelitian :

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010/2011	Pemodelan politik Identitas Pada Partai Politik Dalam Mendukung Penciptaan Kehidupan demokrasi	Hibah DIKTI	35.500.000
2	2010/2011	Pemodelan politik Identitas Pada Partai Politik Dalam Mendukung Penciptaan Kehidupan demokrasi	Hibah DIKTI	35.500.000
3	2008/2009	Pengembangan model representasi perempuan dalam media : Studi kesetaraan gender pada Reality Show tema cinta di televisi untuk meningkatkan martabat perempuan	Hibah DIKTI	35.000.000 (+)
4	Semester ganjil 2012/2013	Penelitian desentralisasi kategori Hibah Bersaing dengan judul : Pola Pengembangan Model Identitas kota (City Branding) sebagai marketing value dalam era otonomi daerah	Surat No: 685/LPPM-UMJ/2013 tentang Daftar peneliti desentralisasi yang didanai oleh	50.000.000
5	2016	Penelitian desentralisasi kategori unggulan PT dengan judul : Pengembangan model pendidikan dan pelatihan gender sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan clean and good governance bagi aparat pemerintahan desa di kota Tangerang Selatan	surat no: 921/LPPM-UMJ/XII/2013 tentang seminar kelayakan penelitian lanjutan 2014 dan lampiran pemenang hibah penelitian desentralisasi 2014	65.000.000,-
6	2018	Militerisasi Sipil: Studi pada FPI	Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta	7.500.000,-

Judul: Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Pasca Pilkada

Internalisasi Nilai-nilai Al Islam Dalam Penelitian:

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebaikan dan menjadi rahmatan lil alamin. Islam mengatur tatacara kehidupan baik yang berhubungan dengan hablumminalloh amupun hablumminannas. Banyak sekali kisah yang terkait dengan kehidupan manusia, salah satunya berkaitan dengan penyelesaian dan pencegahan konflik sosial. Kisah perseteruan habil dan qobil, nabi Nuh dan kaumnya, nabi Ibrahim dengan Abrahah, nabi Musa dengan Fir'aun begitu juga dengan kaum muslimin dan kaum qurais mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia selalu mengalami dinamika. Dalam hal ini Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan dalam alqur'an surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan Ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka: Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau? Dia berkata: Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya kerusakan dan kejahatan dimuka bumi dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagai pengingat bagi kaum muslimin untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tidak bisa dipungkiri, konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia di bumi. Kehidupan manusia dalam segala lingkup syarat akan konflik sosial. Sebagai umat Islam, pedoman al-qur'an menjadi kunci bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan didunia dengan baik.

Ringkasan Penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, hasil, kesimpulan dan luaran yang ditargetkan.

latar belakang Penelitian dari penelitian ini berdasarkan pada fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan data dari Riset Polmark Indonesia, terdapat 4,3 persen responden yang mengaku hubungan pertemanannya rusak karena Pilpres 2014, dan sebesar 5,7 persen responden yang mengatakan hubungan sosialnya terdampak akibat Pemilu Jakarta 2017 [1]. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan. Untuk itu seiring dengan kegiatan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka perlu diadakan kajian tentang *Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah Lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Pasca Pilkada*. Sikap elit lokal dan pemerintah lokal menjadi kunci untuk bisa mencegah konflik sosial pasca pemilu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam mencegah terjadinya konflik sosial pasca pemilu. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mendesign program mitigasi atau pencegahan konflik sosial pasca pemilu untuk mewujudkan demokrasi yang damai dan bermartabat.

Tahapan metode penelitian; dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Dengan pola tersebut dapat dilihat relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam mencegah konflik sosial pasca pemilu. Dalam setiap kegiatan pemilu, elit lokal dan pemerintah lokal mempunyai peran penting untuk melakukan sosialisasi dan program pencegahan munculnya konflik sosial pasca pemilu dilaksanakan.

Hasil Penelitian: Pola penanganan konflik pasca pilkada masih kurang serius, dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh elit lokal dan pemerintah lokal belum optimal karena masih belum dilakukan secara fair baik dari penyelenggara maupun peserta pilkada. Perlu sinergitas bersama untuk menangani konflik dengan baik dari berbagai elemen.

Luaran yang ditargetkan: Artikel di jurnal terakreditasi

Kata Kunci maksimal 5 kata : Politik Lokal, Konflik, Pilkada, elit lokal, pemerintah lokal.

Latar Belakang Penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

Latar Belakang:

Pelaksanaan Pemilu langsung sesungguhnya mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Sejak tahun 2005 telah dilaksanakan pemilu dan dinilai berhasil. Indikator keberhasilan dilihat dengan hadirnya pemimpin yang dianggap benar-benar mewakili rakyat. Namun, dari beberapa pemilu yang telah diselenggarakan, tidak sedikit berujung pada konflik kekerasan. Berdasarkan data dari Riset Polmark Indonesia, terdapat 4,3 persen responden yang mengaku hubungan pertemanannya rusak karena Pilpres 2014, dan sebesar 5,7 persen responden yang mengatakan hubungan sosialnya terdampak akibat Pemilu Jakarta 2017 [1]. Kondisi tersebut telah mencederai demokrasi dan jauh seperti yang diharapkan sebagai mekanisme pemilihan pemimpin yang damai.

Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang di design untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Pemilu diharapkan dapat mencegah konflik dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. Namun, dalam kenyataannya pemilu yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokrasi jauh dari apa yang diharapkan. Melalui design demokrasi electoral, ternyata telah menjadi panggung baru munculnya konflik sosial dan kekerasan. Konflik yang dipandang sebagai sebuah hal yang senantiasa hadir dan wajar dalam kehidupan manusia, menjadi berbeda apabila disandingkan dalam konteks konflik pemilu. Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa konflik yang dimunculkan justru sangat mencemaskan.

Kekerasan yang ditandai dengan adanya benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan yang biasa ditemui. Dalam kondisi ini proses dan mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak sulit mentolerir kepentingan yang bermain. Gambaran design demokrasi yang ada di Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik.

Potensi konflik sosial yang ada di masyarakat akibat pemilu menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKB Maman Imanulhaq dapat dikurangi dengan beberapa cara; (1) Edukasi cukup kepada masyarakat. Untuk memberikan pemahaman bahwa pemilu merupakan hal yang biasa dalam iklim demokrasi sebagai salah satu cara untuk memilih pemimpin harapan rakyat. (2) melakukan gerakan literasi yang massif untuk mencegah masyarakat dari isu hoaks. Literasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat menerima berita hoaks tanpa penyaringan [2].

Pemilukada di Indonesia memiliki logika dasar bekerja dalam demokrasi elektoral (Pemilukada) yaitu; *pertama*, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu one man, one vote, one voice. Preferensi individu sebagian besar didasarkan atas basis sosial (socially bounded Individu). *Kedua*, logika “winner take all”, siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya”, sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Kondisi ini menciptakan “gerbong” birokrasi atas dasar basis sosial di lingkup pemerintahan daerah. Logika *winner take all*, tidak hanya menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Dalam konteks inilah peran elit sangat dibutuhkan untuk aktif dalam melakukan pencegahan konflik sosial pemilukada [3].

Permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilukada. ***Tujuan khusus adalah*** untuk menganalisis peran dan relasi kuasa yang dibangun oleh elit lokal dan pemerintah dalam mencegah konflik sosial pasca pemilukada untuk mewujudkan demokrasi damai dan bermartabat. ***Urgensi penelitian penelitian*** untuk meminimalisir konflik sosial di era pemilukada langsung yang dilaksanakan secara serentak untuk mewujudkan demokrasi damai bermartabat.

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan *peta jalan (road map)* dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

Tinjauan Pustaka:

Relasi Kuasa:

Kekuasaan akan dapat terselenggara kapan saja pada saat seseorang membuat orang lain tunduk dan patuh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan berbagai cara. Dalam kajian tentang *relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilukada* relasi kuasa digunakan untuk mendukung dalam menjelaskan keselarasan kepentingan dalam bentuk koalisi serta hubungan dengan pencegahan konflik pemilukada. Soelaiman Soemardi dalam tulisannya tentang kekuasaan sebagai gejala sosial menjelaskan bahwa untuk melihat proses politik di dalam masyarakat transisi dapat menggunakan pendekatan historis dan struktural fungsional dengan meletakkan kekuasaan pada analisis elit dan golongan kepentingan yang ada [4]. Cara pendekatan struktural fungsional menempatkan masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana proses terpenting dari masyarakat serta sub-sub sistemnya ditujukan pada pemeliharaan dan penyatuan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan merupakan fasilitas sosial atau sumber sosial (*social facility or social resource*).

Kekuasaan mempunyai fungsi sosial, yaitu fungsi untuk seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut maka Talcott Parson menjelaskan bahwa kekuasaan dalam sub sistem politik digambarkan seperti uang dalam sistem ekonomi. Namun sub sistem politik lebih mencakup pada seluruh masyarakat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka politik mempunyai akibat- akibat langsung dan memang sengaja mempengaruhi seluruh masyarakat [5]. Dalam konteks inilah maka kekuasaan dapat berwujud pemimpin yang bertanggungjawab dan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menjelaskan relasi kuasa, perlu dilihat terlebih dahulu bagaiman kekuasaan

itu hadir di dalam masyarakat. James S. Coleman menjelaskan bahwa dalam sebuah komunitas, terdapat kekuasaan dalam bentuk ketundukan individu kepada kelompok serta pengaturan kekuasaan berdasarkan pada konsensus, adapun kontrol terhadap kekuasaan berasal dari keluarganya sendiri [6]. Dalam hal ini aksi sosial tidak sekedar berupa transaksi antar tiap-tiap individu dalam konteks persaingan atau pasar, individu juga dapat bertindak atas dasar individu lain.

Kondisi pertukaran kekuasaan yang ada di dalam masyarakat akan berbeda dengan kondisi pertukaran yang ada di dalam organisasi formal. Dalam organisasi formal, penyerahan hak mengontrol dilaksanakan demi mendapatkan upah/gaji [7]. Berbeda dengan pandangan James s. Coleman, pandangan Peter M. Blau dalam buku teori sosiologi modern George Ritzer menjelaskan bahwa proses pertukaran yang terjadi di dalam masyarakat yang mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antarindividu maupun antar kelompok. Ada beberapa indikator penting untuk melihat pola pertukaran menurut Blau; *Pertama*, Mikro ke Makro. Pada tingkatan individu lebih ditekankan pada individu dan tindakan yang disebabkan karena reaksi atas pemberian hadiah dari orang lain. Orang akan saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. *Kedua*, Norma dan nilai, menurut Blau mekanisme yang menengahi antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai (konsensus nilai) yang ada di dalam masyarakat.

Konflik Sosial:

Dalam artikelnya di jurnal sosiologi, dengan judul "*Social Conflict and The Theory of Social Change*", Lewis A. Coser menjelaskan tentang fungsi konflik sosial dalam perubahan sosial (Coser, *The British Journal of Sociology*, Vol.8, No.3 [8]. Dalam tulisan tersebut Coser memberikan penekanan beberapa hal: *Pertama*, berkaitan dengan beberapa fungsi konflik yang ada di dalam sistem sosial, lebih jauh lagi berkaitan dengan institusi, peningkatan secara teknis dan produktivitasnya. *Kedua*, Coser lebih menekankan pada hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Dalam pandangan Lewis A. Coser konflik menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesadaran dan perubahan yang ada dalam

masyarakat. Pemikiran Coser merupakan perluasan dari pemikiran George Simmel yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperbaiki kepaduan integrasi [9]. Konflik dalam suatu kelompok juga mampu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Konflik juga dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Dalam memahami konflik, Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat memperkuat struktur di dalam masyarakat. Coser membuat dua hal perbedaan: konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Adapun konflik non realistik dilihat sebagai konflik yang muncul bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Konflik yang ada di dalam masyarakat merupakan tanda-tanda sesuatu yang hidup dan berkembang. Ketiadaan konflik dipandang sebagai hal yang negatif karena dapat dimaknai sebagai bentuk penekanan terhadap masalah-masalah yang akan mendorong kekacauan. Konflik yang lebih kearah fungsional lebih menekankan pada hubungan antar kelompok. Sehingga menurut Coser terdapat hubungan antara peningkatan konflik dengan peningkatan hubungan antar kelompok. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus digunakan sebagai subjek di dalam konflik itu. Apabila tidak ada toleransi dan institusionalisasi terhadap konflik yang ada, maka ini akan memunculkan disfungsional bagi struktur sosial. Teori konflik Coser yang lebih mendasarkan pada fungsionalisme menjadi penting untuk dapat menjelaskan temuan-temuan penelitian sebagai kerangka pendukung untuk melihat proses yang terjadi.

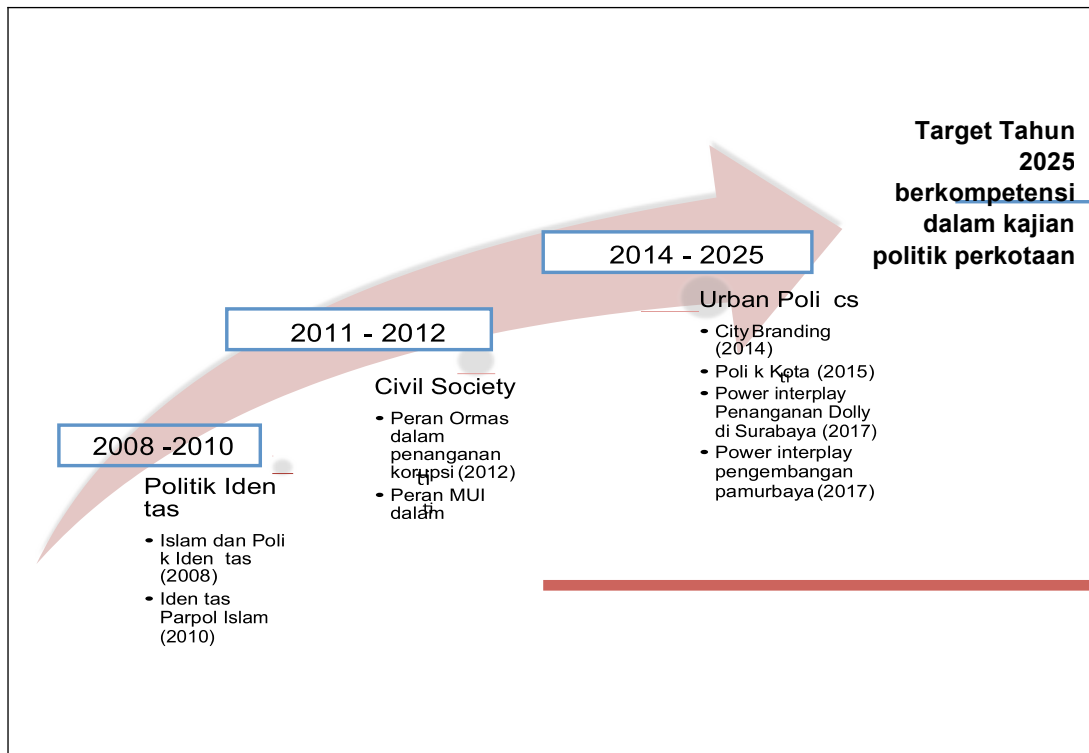
State of The Art :

No	Judul Penelitian terdahulu	Metode	Hasil kajian
1	Bentuk Resolusi Konflik Dalam Pilkada : Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara (peneliti: Ikhsan Darmawan) [10]	Pelaksanaan pemilihan lokal langsung adalah berefek pada peningkatan intensitas konflik. Konflik tersebut terkait dengan: (1) Apakah pemilihan lokal diadakan atau tidak bila hanya ada beberapa kandidat yang terdaftar, dan (2) jika pemilihan lokal diadakan, kapan akan diadakan. Tesis ini mencoba menjawab dua pertanyaan: (1) Bagaimana penyelesaian konflik di Kota Yogyakarta dan pemilihan lokal Daerah Jepara?, (2) Bagaimana dengan bentuk resolusi konflik yang digunakan di Kota Yogyakarta dan pemilihan	Hasil dari penelitian i bahwa metode konflik yang di dalam pemilihan kotamadya Yogyakarta konsiliasi dan arbitra lain, metode resolut yang digunakan pemilihan lokal adalah konsiliasi, med arbitrase
2	Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia (Mahi m. hikmat) [11]	Pemilihan langsung di Indonesia lahir pascareformasi. Perubahan UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004 telah mengubah Pilkada semula dipilih DPRD menjadi oleh seluruh rakyat daerah. Namun pilkada langsung tidak lepas dari masalah untuk mengungkap fakta tersebut dilakukan kajian “Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal di dalam Pilkada langsung di Indonesia.	Masalah utama ketidakmatangan kebijakanumum Pemerintah bentuk "aturan main" dan kecukupan waktu implemetasi. Hal itu melahirkan sederet kelemahan: (a) Daftar Pemilih Belum Jelas; (b) Sarana-Prasarana Pengawasan Tidak memadai; (c) Pengiriman Surat Suara Terlambat; (d) Psikologi calon dan pendukung tidak siap, (e) sosialisasi tidak maksimal, (f) KPU belum

3	Pilkada serentak dan Potensi Konflik di Sulawesi Selatan [12]	Di Sulawesi Selatan Potensi Konflik Pilkada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari Pilkada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan Undang-undang Pemilu	Yang berpotensi konflik pada Pilkada serentak nantinya adalah massa pendukung dari basis tradisional, pola hubungan sosiologis dan psikologis. Karakter pemilih yang memiliki militansi tinggi yang kelompok die hard supporter dan usefull idiots. Tidak terjadi transparansi informasi kepada masyarakat. Serta konflik internal parpol pada saat penjurangan calon
---	---	--	---

Dari tiga penelitian tentang konflik Pilkada diatas, yang membedakan sebagai **novelty** adalah kajian yang terkait dengan “**Relasi kuasa Elit lokal dan Pemerintah Lokal dalam Pencegahan Konflik Sosial Pasca Pilkada**”.

Peta Jalan/ Roadmad Penelitian:



Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini menggunakan dasar teori relasi kuasa James Collemen yang menempatkan sebagai kajian terpenting dalam konteks pencegahan konflik sosial pasca Pemilukada. Tahapan kerja dalam penelitian meliputi:

1. Tahap pengumpulan data:

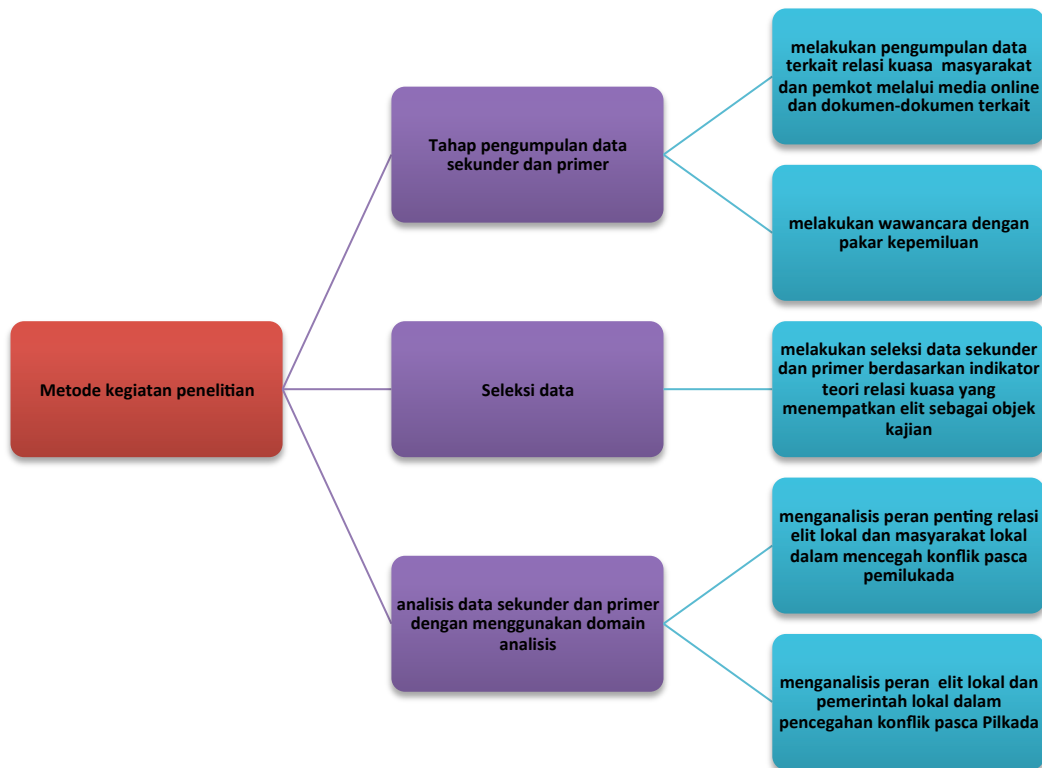
pada tahap ini tim peneliti melakukan seleksi pengumpulan data sekunder dari media online dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik pemilukada. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan pakar. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil evaluasi laporan pemilukada yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2015 dan 2017. Selain itu hasil penelitian yang dipublikasikan baik melalui surat kabar, buku maupun jurnal menjadi rujukan peneliti. Peneliti juga mengoptimalkan data-data dari web resmi DKPP, Bawaslu dan KPU untuk melakukan tracking atau penelusuran fenomena dan peristiwa yang terjadi pada tahun 2015 dan 2017 yang dapat dipetakan untuk mengetahui penyebab konflik dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah dan juga elit sebagai bentuk proses kohesi yang dilakukan oleh elit lokal dan pemerintah lokal dalam menangani konflik.

Selain data sekunder, peneliti juga melakukan penggalian data kepada informan yang mempunyai kompetensi dalam kajian kepemiluan. Data informan diambil melalui guide interview dan google form. Data tersebut digunakan untuk mengukur akuntabilitas data (triangulasi data).

2. Tahap Seleksi data sekunder: Peneliti melakukan seleksi terhadap data sekunder yang berasal dari media online, serta dokumen-dokumen tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan pemilukada. Data sekunder di khususkan pada data yang mendukung dalam pemetaan konflik, isu penyebab konflik, program yang dijalankan oleh pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemilukada sebelumnya.

3. **Tahap Analisis data:** peneliti melakukan analisis data sekunder dan primer (wawancara) dengan menyusun domain-domain pokok bahasan yang terkait dengan relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilukada.

Bagan 1
Tahap Analisis Data



Pembagian Kerja Tim



Konflik dan Pengelolaan Konflik Coser dalam PILKADA

Dalam artikelnya “*Social Conflict and The Theory* Lewis A. Coser melihat konflik sebagai hal penting untuk dikaji. Konflik akan selalu berkaitan dengan kesadaran dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Konflik dalam suatu kelompok juga mengaktifkan peran individu yang semula pasif. Konflik yang selama reformasi ini selalu hadir per periode juga dialami dalam fenomena dan kondisi perhelatan pemilihan umum. Yang menjadi perhatian saat ini adalah konflik yang terjadi pada saat Pilkada (pemilihan Kepala Daerah). Konflik Pilkada menjadi penting untuk dikaji karena mampu membangkitkan kohesi dan juga peran aktif masyarakat daerah yang berbasis pada kepentingan politik.

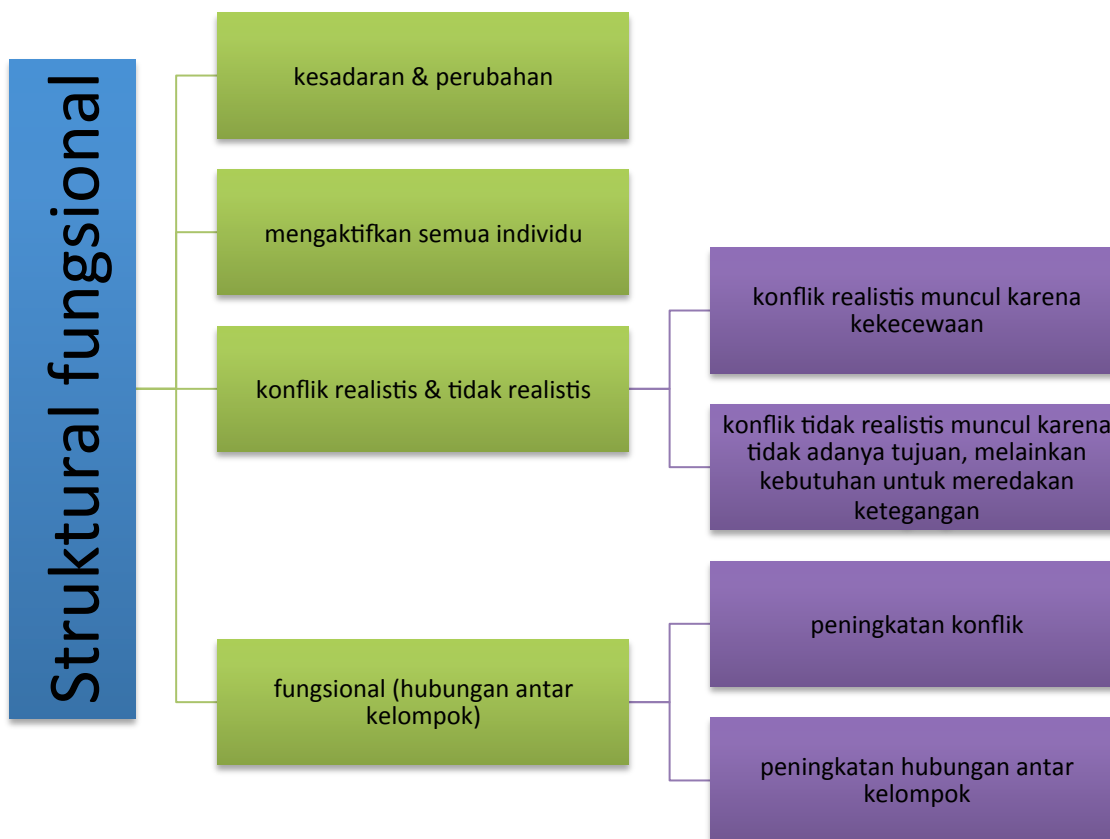
Munculnya Pilkada sebagai produk dari reformasi mendorong masyarakat aktif untuk membangun jejaring, menciptakan isu dan mengakomodir kepentingan yang sama dalam masyarakat. Kondisi persaingan politik untuk memperebutkan kekuasaan telah berimplikasi pada munculnya konflik sosial. Kajian yang dilakukan oleh Coser menempatkan konflik sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat memperkuat struktur di dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya masyarakat-masyarakat yang militan yang berfungsi mendukung kandidat tertentu dalam kontestasi Pilkada. Dari sisi fungsionalisme, terbangunnya konflik didasari atas kepentingan dukungan dengan memanfaatkan isu-isu SARA dan kepentingan pragmatis lainnya, seperti ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan posisi yang strategis dalam politik, serta memperkuat jaringan kekuasaan.

Coser membuat dua hal perbedaan: konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Dalam kontestasi Pilkada, konflik ini akan selalu hadir dalam mendorong kepemimpinan baru yang lebih progresif. Menempatkan kontestan atau calon kepala daerah dalam posisi pendatang baru atau *incumbent*, serta ukuran program yang realistik dan tidak.

Konflik yang tidak realistik menurut Coser merupakan konflik yang muncul tidak didasarkan pada tujuan- tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Hal ini dipandang tidak realistik karena Konflik yang ada di dalam

masyarakat merupakan tanda-tanda sesuatu yang hidup dan berkembang. Konflik akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Coser lebih menekankan pada konflik kearah fungsional. Konflik ini lebih menekankan pada hubungan antar kelompok. Sehingga menurut Coser terdapat hubungan antara peningkatan konflik dengan peningkatan hubungan antar kelompok. Dalam konteks Pilkada banyaknya fenomena pertengkarannya antar tetangga, retaknya persahabatan yang lebih menggambarkan renggangnya hubungan antar kelompok dan individu dengan didasarkan pada isu-isu Pilkada yang bersifat politik. Penekanan yang diutamakan oleh Coser dalam konflik fungsional adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus digunakan sebagai subjek di dalam konflik itu. Apabila tidak ada toleransi dan institusionalisasi terhadap konflik yang ada, maka ini akan memunculkan disfungsional bagi struktur sosial.

Bagan. 2
Pola Konflik COSER Stuktural Fungsional



Dalam penelitian ini diambil beberapa contoh konflik yang terjadi dalam Pilkada tahun 2015, 2017 dan 2018. Dari ketiga periode pelaksanaan Pilkada, konflik politik lebih menguat pada pilkada

2018. Kondisi ini dikarenakan pelaksanaan pilkada berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

PETA KONFLIK DALAM PILKADA 2015, 2017 DAN 2018

Penelitian ini akan mengambil 3 peristiwa perhelatan pemilihan kepala daerah sebagai alat untuk dapat menemukan peran elit politik dan pemerintah kota dalam menangani konflik yang muncul setelah perhelatan pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Dengan menyoroti 3 pola konflik yang muncul dalam pelaksanaan pilkada tersebut, akan diperoleh peta tentang jumlah peserta, jumlah daerah yang melaksanakan, jumlah kasus yang ditangani, isu-isu yang berkembang, peran elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015:

Peserta Pilkada :

Pada Pilkada 2015 diikuti oleh 269 daerah, dan terdapat 150 gugatan sengketa hasil yang dilayangkan ke MK. Dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara gugatan sengketa akhir yang akhirnya ditindaklanjuti. Hal ini belum memperhitungkan masalah lain seperti administrasi, kampanye, partisipasi pemilih maupun imbas sosial politik akibat konflik Pilkada [13].

Jumlah Konflik:

Pilkada tahun 2015-2014 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tercatat telah berlangsung selama 1.027 kali yang telah memunculkan konflik. Adapun konflik yang terjadi dapat dirinci sebagai berikut; 1.323 insiden kekerasan dengan 53 korban tewas, 1.172 cedera, dan 829 bangunan rusak. Sebanyak 648 insiden, dalam bentuk perusakan berskala kecil. Dalam konflik tersebut, dampak kekerasan terjadi di 16 wilayah yaitu:

- (1) Provinsi Aceh;
- (2) Sulawesi Selatan;
- (3) Maluku Utara;
- (4) Jawa Timur;
- (5) Sumatra Utara;
- (6) Papua;
- (7) Nusa Tenggara Barat (NTB);
- (8) Maluku;
- (9) Sulawesi Utara;
- (10) Sulawesi Tengah;
- (11) Lampung;
- (12) Nusa Tenggara Timur (NTT);
- (13) Kalimantan Barat;

- (14) Kalimantan Tengah;
- (15) Papua Barat;
- (16) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

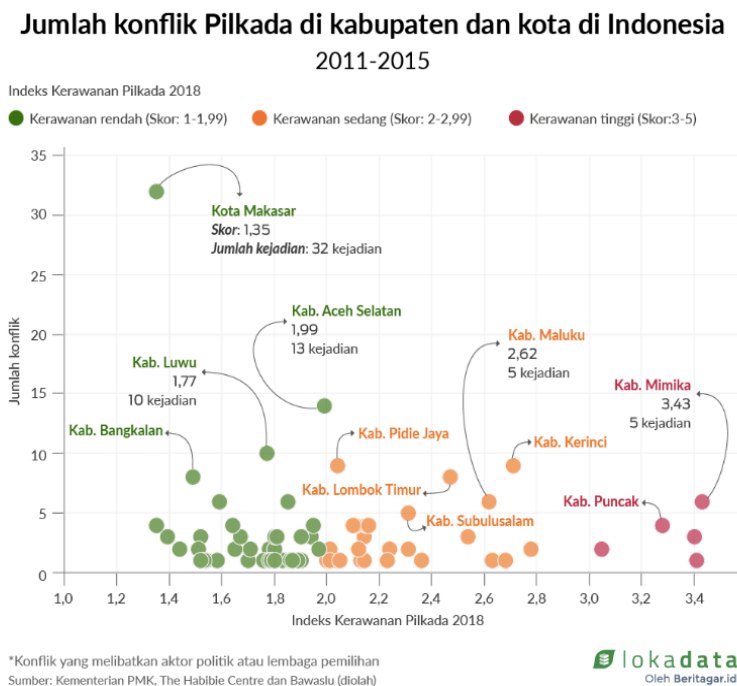
Bentuk dan Penyebab Konflik:

Konflik tersebut dalam bentuk tindakan kekerasan seperti perusakan, kemudian penganiayaan/penembakan, demonstrasi anarkis, mobilisasi massa (bentrokan dan kerusuhan), pengeroyokan, serangan teror, perkelahian, blokade, penculikan, dan *sweeping*. Terjadinya konflik dan insiden kekerasan muncul pada masa kampanye, serta proses registrasi dan administrasi. Dimana jumlah konflik lebih dari 1.000 insiden.

Konflik tersebut disebabkan oleh aktor politik dan lembaga penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan pilkada. Pihak yang sering terlibat dalam konflik pilkada dari kalangan antar pendukung kandidat/partai sebanyak 58 persen atau 789 pelaku. Kemudian pendukung kandidat/partai vs pemerintah sebanyak 17 persen atau 231 orang. Diikuti pendukung kandidat/partai vs penyelenggara pemilu/pilkada sebanyak 15 persen atau 193 orang. Sisanya pihak lain-lain, tercatat sekitar 10 persen [14].

Gambar 1.

IKP Kabupaten dan Kota Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015



Sumber: (<https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>)

Program Preventif Pemerintah:

Dalam mencegah konflik Pilkada tahun 2015, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh institusi intelijen melalui penyelidikan dan analisis situasi yang menghasilkan sistem deteksi dini dan peringatan dini untuk disajikan kepada pemerintah terutama aparat keamanan. Karena konflik pilkada hadir karena “*by design*”.
2. Menempatkan Intelijen menjadi garda terdepan dalam fase pencegahan konflik ini untuk menyajikan informasi yang akurat kepada pemerintah/aparat keamanan.
3. Pemerintah menerapkan sistem deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman konflik dan segera melakukan tindakan supaya konflik tersebut tidak terjadi.
4. Persiapan jika terjadi konflik dengan melakukan Skenario penanganan konflik seperti pengendalian huru hara, evakuasi dan kegiatan lain dapat dilatih dan disimulasikan.
5. Semua penyelenggara pilkada serentak harus menyiapkan skenario penanganan konflik.
6. Pemerintah mempunyai perencanaan untuk fase pemulihan jika terjadi konflik. Skenario pemulihan korban disiapkan untuk mencegah konflik lanjutan sebagai balas dendam. Pemulihan konflik juga harus melibatkan segenap lapisan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan atau diabaikan.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017:

Peserta Pilkada :

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia mengalami intensitas konflik dengan berbagai isu yang berkembang dan bermain. Pada tahun 2017, Indonesia telah menyelenggarakan 101 Pilkada Serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah terbanyak menggelar Pilkada, yakni 1 pemilihan gubernur, 20 pemilihan bupati dan wali kota.

Jumlah Konflik:

Masih banyak kendala dan rintangan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada. Dari 101 pilkada yang dilakukan pada 2017, terdapat 53 permohonan sengketa hasil pilkada yang diajukan ke MK yang terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Permohonan penyelesaian sengketa tersebut telah diputus MK, baik putusan sela maupun putusan akhir [15].

Bentuk dan Penyebab Konflik:

Potensi permasalahan dalam Pilkada yang sering terjadi disebabkan karena: politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal. Indikasi yang muncul hingga tahapan kampanye yang saat ini sedang berlangsung sebelum pencoblosan nanti tanggal 15 februari 2017 untuk Pilkada Serentak tahap kedua, sebagai berikut:

1. Penyusunan DPT yang tidak akurat.
2. *Money politic*, penggunaan uang sebagai alat untuk membeli dukungan
3. *Abuse of power* pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara pemilu.
4. *Black campaign* dan *hoax*. Pilkada akan diwarnai dengan kampanye terselubung dan informasi palsu, sesat dan negatif yang memanfaatkan jaringan online seperti blog, web, maupun medsos yang memiliki jangkauan luas, intens, dan anonimitas.
5. Logistik pemilu, surat suara, formulir-formulir, dan lainnya. Kualitas logistik tidak sesuai dengan aturan, secara sengaja menghalangi distribusi untuk mengganggu tahapan Pilkada dan merusak kredibilitas penyelenggara Pilkada.

Pola konflik Pilkada tahun 2017 diantisipasi oleh pemerintah dengan menindaklanjuti beberapa program, antara lain:

- a. Mendalami dan melaporkan permasalahan logistik Pilkada di daerahnya.
 - b. Memantau kondisi tempat penyimpanan logistik Pilkada dan berkoordinasi dengan TNI/Polri jika ditemukan adanya permasalahan terkait pengamanan logistik Pilkada.
 - c. KPUD, Panwaslu dan Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk terus menyosialisasikan surat undangan model C-6 dan petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mendapatkan model C-6.
 - d. Memberikan masukan ke Pemda untuk mengutamakan pencetakan logistik Pilkada untuk daerah dengan kondisi geografis yang sulit, sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan secepat mungkin..
6. Manipulasi penghitungan suara.

Program Preventif Pemerintah:

Untuk mengantisipasi potensi konflik, maka pemerintah melakukan tindakan preventif, antara lain:

1. Menyempurnakan aturan serta tatalaksana teknis daripada Pilkada, baik organisasi, infrastruktur maupun personel penyelenggara.
2. Melakukan sosialisasi kepada para kandidat, partai dan masyarakat tentang berbagai aturan Pilkada, kaidah moral dan etik dalam persaingan Pilkada.
3. Menumbuhkan kesadaran partisipasi efektif dan konstruktif dalam Pilkada.

4. Penyelenggara maupun penegak hukum harus bersifat profesional, netral dan tegas terhadap pelanggaran aturan Pilkada.

Tabel 1
Peta Wilayah Dengan Tingkat Kerawanan Tertinggi
Tahun 2017

No	PROPINSI	TOTAL IKP	Dimensi Penyelenggaraan	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
	Peringkat IKP	Bobot AHP	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata
	Tertinggi - Terendah	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5	Range 0-5
1	Papua Barat	3,381	3,378	2,917	2,667
2	Provinsi Aceh	3,327	3,267	3,125	3,000
3	Banten	3,147	3,133	3,708	2,433
4	Provinsi Sulawesi Barat	2,367	2,556	2,083	2,233
5	DKI Jakarta	2,297	1,822	2,958	1,500
6	Provinsi Kep. Bangka Belitung	2,293	1,956	2,625	1,900
7	Gorontalo	2,015	1,556	2,083	2,067

sumber : <http://ksp.go.id/menangkal-potensi-konflik-pilkada-serentak-2017/index.html>

Gambar. 2
Peta Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Sedang Tahun 2017



Sumber : <https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya>

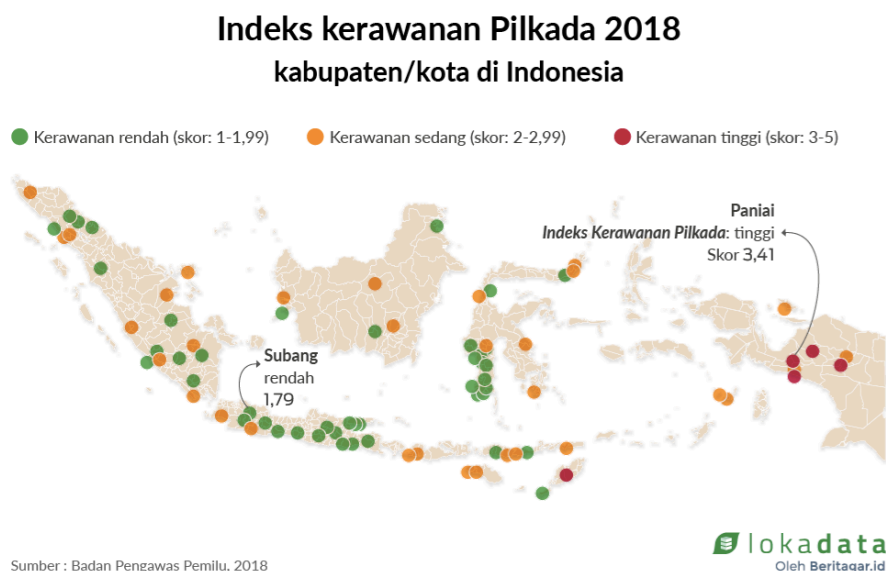
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018:

Peserta Pilkada:

Pelaksanaan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah, yakni terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten-kota, bersamaan dengan tahapan persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di 2019 [16].

Pada Pilkada 2018 yang meliputi 171 wilayah pemilihan, terdapat beberapa kabupaten/kota paling rawan yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua yaitu Kabupaten Mimika (3,43), kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07) dan NTT, Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan (3,05). Sisanya di pilkada tingkat kabupaten/kota lainnya dianggap memiliki tingkat kerawanan sedang dan rendah [17].

Gambar. 3
Indeks Kerawanan Pilkada 2018



Sumber: (<https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>)

Penyebab Konflik:

Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menetapkan tiga provinsi yang dikategorikan memiliki kerawanan paling tinggi. Ketiganya meliputi Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku. Adapun penyebab tingkat kerawanan tertinggi pada pemilihan Gubernur Papua ditentukan oleh faktor partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan

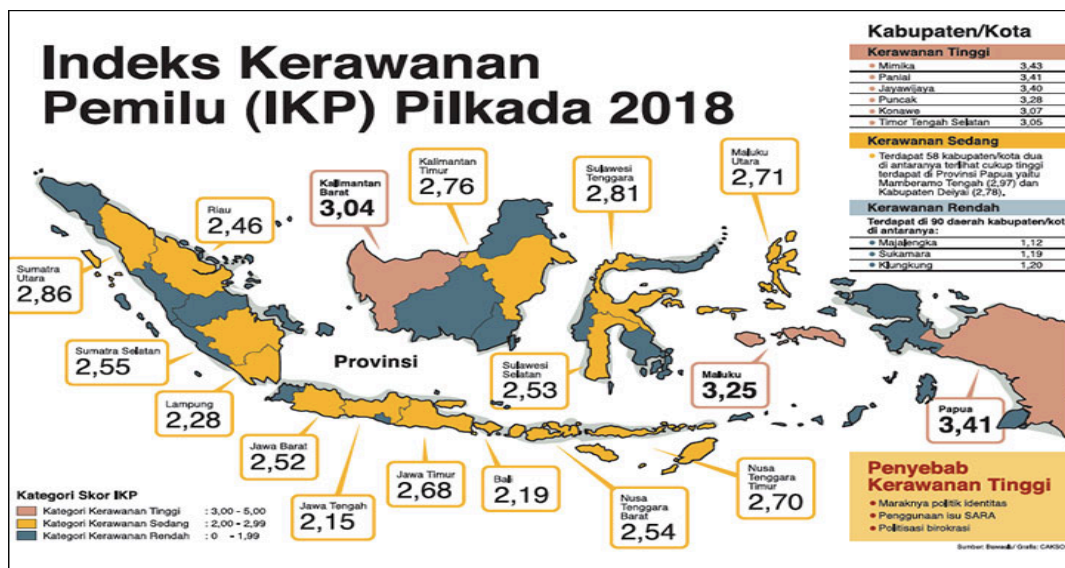
terhadap hak pilih yang minim. Sementara itu, pada pilgub Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaraan yang berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara [18].

Tahapan Potensi konflik [19]:

1. Tahap verifikasi pasangan calon oleh KPUD
2. Tahap pelaksanaan pemungutan/pemberian suara
3. Tahap pengumuman hasil pilkada
4. Saat petahana kembali maju dalam Pilkada.

Gambar 4.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018



Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/134311-proteksi-hak-pilih-di-papua-minim>

Program Preventif pemerintah:

Tiga Hal Penting yang harus menjadi perhatian didalam meminimalisir konflik [19]:

1. Penyelenggaraan tidak profesional, tidak independen, tidak tegas
2. Mobilisasi yang dilakukan elit politik lokal
3. Potensi konflik yang bersumber pada regulasi yang multitafsir, salah satunya berkaitan dengan politik uang.
4. Perundang undangan yang terus menerus berubah sehingga menimbulkan perbedaan multitafsir.

Langkah-langkah Preventif dan Represif Pemerintah dalam menangani Konflik Pilkada 2018:

1. Mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk mendinginkan situasi politik selama masa kampanye pilkada.

2. Meminimalisasi isu-isu provokatif dan berita *hoax* di media sosial dengan memperkuat patroli *cyber*.
3. Polri menyiapkan rencana juga yang bersifat pengamanan terbuka maupun upaya refresif dan kontingensi.

Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Pencegahan Konflik Pasca

Pilkada:

Dalam melakukan mapping relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal pada pelaksanaan Pilkada, perlu di lihat terlebih dahulu ada tidaknya peran elit dan pemerintah lokal didalamnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan diperoleh data bahwa terdapat beberapa point penting penyebab konflik:

1. Isu SARA
2. Agitasi dan propaganda 5berlebihan di media
3. Polarisasi ekstrem antar kelompok
4. Kelemahan regulasi penyelenggaraan
5. Persoalan netralitas penyelenggara (KPUD yang "bermain", dengan Peserta Pilkada, Elit Lokal, Pemerintah lokal) yang tampak dalam tiap-tiap tahapan penyelenggaraan
6. Indikasi kecurangan peserta (politik uang, dll)
7. Isu "over-action" pemerintah terkait tendensi dukungan pada salahsatu peserta (kandidat petahana atau yang didukungnya), kebijakan diskriminatif, pengendalian informasi dan akses layanan.
8. KPUD yang "bermain", dengan Peserta Pilkada, Elit Lokal, Pemerintah lokal
9. Jabatan
10. Money politics
11. Problem data pemilih dan kampanye
12. Media Sosial
13. "Jurang pemisah" antara pendukung antar calon terlalu dalam.

Peran elit lokal dalam pencegahan konflik dan penanganan konflik pasca Pilkada:

Elit lokal sejatinya mempunyai peran penting dalam menangani konflik pasca Pilkada. Karena merekalah yang menjadi bagian dari kontestasi perebutan kekuasaan. Namun dalam kenyataanya peran elit lokal belum muncul. Peran yang ditunjukkan oleh elit lokal dapat dilihat dalam bentuk :

1. Himbauan kampanye damai
2. Mengendalikan massa pendukungnya
3. Menunjukkan netralitas

4. Menjaga jarak atau memberi ruang komunikasi yang imparial pada para kandidat
5. Menyampaikan anjuran untuk berkompetisi secara fair dan damai
6. Kalaupun secara terbuka mendukung salahsatu kandidat, tidak melakukan provokasi berlebihan dan menebarkan kebencian pada kandidat yang tak didukung.
7. Kepatuhan kepada aturan

Upaya yang dilakukan elit lokal dalam pencegahan konflik seirama dengan upaya Hal yang dilakukan elit lokal dan pemerintah lokal dalam menangani kondisi setelah terjadi konflik Pilkada.

Hal yang dilakukan oleh elit lokal antara lain :

1. Himbauan untuk tidak mengulangi
2. Mendekati massa pendukung calon yang kalah, memberikan pemahaman proses pilkada
3. Yang diupayakan adalah mencegah konflik meluas dengan membangun komunikasi dengan para pihak, kemudian memfasilitasi terwujudnya kompromi atau kesepakatan untuk mendorong penyelesaian dalam koridor hukum.
4. Komunikasi persuasif tokoh masyarakat secara institusi dan personal
5. Komunikasi dan silaturahmi
6. Biasanya mengambil sikap yang menguntungkan posisi mereka
7. Mediasi
8. Membantu pemerintah dalam menangani konflik.

Peran pemerintah dalam pencegahan konflik pasca Pilkada:

Peran pemerintah dalam pencegahan konflik pasca Pilkada ada namun mempunyai pola bervariasi. Mulai sangat besar hingga sangat kecil terutama berkaitan dengan fasilitasi dan netralitas birokrasi. Adapun bentuk dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah lokal dalam menangani konflik pasca Pilkada antara lain:

1. Himbauan kampanye damai
2. Tidak berpihak, bersikap fairness, pendekatan terhadap seluruh calon yang bertarung
3. Menunjukkan netralitas
4. Menjaga jarak dan atau memberi ruang komunikasi yang imparial pada para kandidat
5. Menyampaikan anjuran untuk berkompetisi secara fair dan damai
6. Tidak melibatkan aparaturnya dalam hal dukung-mendukung secara terbuka dan atau kemenangan salahsatu kandidat.
7. Koordinasi dan komunikasi intensif
8. Mediasi dan program pembangunan
9. Sosialisasi dan kesiapan penyelenggaraan

10. Himbauan saja

11. Pengawasan yang ketat terhadap mereka yang potensi konflik. Pemerintah kadang melakukan pemetaan wilayah potensi konflik yang tinggi dan yang rendah.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal setelah terjadi Konflik Pilkada:

1. Himbauan atau kerja sama dengan kepolisian untuk menangkap penyebar isu
2. Tidak berpihak pada salah satu Paslon, mengajak elit lokal dan massa pendukung paslon untuk berperan dalam mengendalikan massa yang terlibat konflik
3. Melakukan upaya persuasif, koersif hingga represif agar konflik dapat diselesaikan, tidak meluas dan digunakannya instrumen hukum.
4. Koordinasi dengan Polri dan atakeholder Pilkada
5. Komunikasi dan silaturahmi
6. Konsolidasi publik Konsolidasi publik
7. Himbauan
8. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam menangani konflik.

Dari data informan dilapangan pola penanganan konflik pasca pilkada masih kurang serius, dan sengaja dibiarkan, terutama apabila calonnya dari partai/kelompok yang sama dengan elit lokal/pemerintah. Untuk itu upaya mencegah terjadinya konflik lebih baik dari pada menangani konflik yang telah terjadi. Upaya pencegahan konflik sebaiknya dilakukan dengan bersikap fair dari penyelenggara maupun peserta pilkada. Apabila konflik Pilkada sudah terjadi, maka perlu sinergitas bersama untuk menanganinya baik dari peserta/kontestan Pilkada, pemerintah dan elit lokal sangat dibutuhkan dalam meredam konflik.

Disisi lain daerah dengan kerawanan konflik tinggi biasanya ditandai dengan keterlibatan elit lokal, ketidaknetralan penyelenggara dan atau pemerintah lokal. Mereka juga berperan menjadi bagian dari penyulut konflik. Posisi elit dan pemerintah lokal justru menjadi penghalang upaya penyelesaian konflik. Sementara itu para penyelenggara pemerintahan lokal maupun penegak hukum dan keamanan kerap kali gagal membangun komunikasi berbasis komunitas dan lebih cenderung menggunakan pendekatan keras (koersif dan represif) dalam upaya pencegahan maupun pengendaliannya, sehingga sulit dijaga keberlangsungannya secara jangka panjang. Elit lokal dan pemerintah lokal juga membutuhkan seni tersendiri dan manajemen konflik. Upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara proaktif menjalin komunikasi dan silaturahmi sehingga konflik di beberapa wilayah dapat terselesaikan, walaupun dalam kenyataanya konflik di beberapa wilayah tidak terselesaikan dengan baik.

Luaran Penelitian : Berisi perkembangan luaran wajib dan luaran tambahan. Jika ada perbedaan dengan proposal sampaikan dan diperbolehkan berubah asalkan nilai kumulatif lebih tinggi. Misalnya janjinya di proposal Jurnal Nasional diganti menjadi Jurnal Internasional dll.

Luaran : Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/index>

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Pola penanganan konflik pasca pilkada masih kurang serius, dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal, terutama dari partai/kelompok yang sama dengan elit lokal/pemerintah. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh elit lokal dan pemerintah lokal belum optimal karena masih belum dilakukan secara fair baik dari penyelenggara maupun peserta pilkada. Untuk itu perlu sinergitas bersama untuk menangani konflik dengan baik dari berbagai elemen. Masih ditemukan posisi elit dan pemerintah lokal yang menjadi penghalang upaya penyelesaian konflik. Upaya penegak hukum dan keamanan kerap gagal dalam membangun komunikasi berbasis komunitas dan lebih cenderung menggunakan pendekatan keras (koersif dan represif) sehingga sulit dijaga keberlangsungannya secara jangka panjang. Elit lokal dan pemerintah lokal juga membutuhkan seni tersendiri dan manajemen konflik dan cara proaktif menjalin komunikasi dan silaturahmi dalam menyelesaikan konflik.

Ucapan Terima Kasih:

Terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melakukan penelitian dalam kondisi Covid 19. Terimakasih juga kami sampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memfasilitasi program penelitian melalui SIMLITABMAS. Kami sampaikan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan ruang yang sangat luas kepada dosen untuk melakukan penelitian secara mandiri. Dengan kesempatan ini diharapkan dosen dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu memberikan sumbangsih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

- [1] <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/23592811/potensi-konflik-akibat-pemilu-terancam-meningkat-karena-hoaks>
- [2] <https://tirto.id/catatan-polmark-perpecahan-masyarakat-karena-pemilu-nyata-cVHj>
- [3] <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/memahami-konflik-pasca-pemilukada/>
- [4] Budiardjo, Mirriam. (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar harapan (hal: 37-41).
- [5] Budiardjo, Mirriam. (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar harapan. (hal: 37- 41).

- [6] James Coleman, Pengantar Sosiologi Modern, Pustaka Media, Jakarta, 2011:88.
- [7] James Coleman, Pengantar Sosiologi Modern, Pustaka Media, Jakarta, 2011: 89-95.
- [8] Lewis A. Coser , *Social Conflict and The Theory of Social Change*”, *The British Journal of Sociology*, Vol.8, No.3 (Sep,1957:197-207).
- [9] Ritzer, Georger. (2004). *Teori Sosial Modern*, Penerbit Kencana,Prenada Media, Rawamangun, Jakarta 2004 hal.159.
- [10] <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4880/4426>
- [11] Mahi.M.Hikmat, Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jin. A.H. Nasution 105 Bandung email: mmhikmat@yahoo.co.id, ISSN 0215 -8175 I, EISSN 2303 -2499
- [12] Ahmad Amiruddin, Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan, Artikel,*Universitas Sulawesi Barat Email: ahmadamiruddin@gmail.com*
- [13] <http://ksp.go.id/menangkal-potensi-konflik-pilkada-serentak-2017/index.html>.
- [14] <https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>
- [15] (<https://nasional.tempo.co/read/877517/penyelesaian-sengketa-pilkada-2017-dianggap-lebih-baik/full&view=ok>).
- [16](<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/08/oz2t9s330-kpu-potensi-konflik-di-pilkada-serentak-2018-lebih-besar>).
- [17] (<https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>)
- [18] <https://mediaindonesia.com/read/detail/134311-proteksi-hak-pilih-di-papua-minim>
- [19] <http://ksp.go.id/menangkal-potensi-konflik-pilkada-serentak-2017/index.html>)

Lampiran : tautan google form untuk informan <https://bit.ly/3i7dN55>

Dokumentasi penelitian: berisi Foto dan hasil perhitungan / pengujian Laboratorium (terlam

Rekapitulasi Luaran penelitian dan tautannya dan filenya:

No.	Luaran	Jenis Luaran (Jurnal terakreditasi/HKI/lainny)	Judul luaran	Tautan untuk akses
1	Jurnal <u>Sospol</u> : Jurnal Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang ISSN : 2597-6648 PISSN : 2088-8090 <u>Social</u>	Jurnal terakreditasi sinta 3	Paper	http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/index

Jika ada luaran yang masih dalam proses terbit harus melampirkan bukti penerimaan dll dan manuskrip/file hasil luaran

Surat pernyataan orignalitas hasil penelitian (tanda tangan di atas meterai)

Format terlampir:

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Bersama surat ini saya dengan identitas:

Nama Ketua	: Dr. Lusi Andriyani, SIP.,M.Si
NIDN	: 0001027801
Prodi/Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Penelitian	: Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Pasca Pilkada
Nama Anggota 1	: Djoni Gunanto, SIP.,M.Si
NIDN	: 0330038005
Prodi/Fakultas	: Ilmu Politik/ FISIP
Nama Anggota 2	: Muhammad Sahrul, S.Sos.,M.Si
NIDN	: 0301019101
Prodi/Fakultas	: Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil kerja tim peneliti bersama mahasiswa yang bersifat orisinil dan bertanggungjawab atas hasil luaran wajib dan tambahan. Jika di kemudian hari ada tuntutan terhadap hasil ini maka kami siap bertanggungjawab dan menerima sanksi yaitu diantaranya tidak boleh melakukan kegiatan penelitian/pengmas dengan pendanaan Universitas/Fakultas.

Jakarta, 28 Juni 2020

Yang Menyatakan

(Dr. Lusi Andriyani, SIP.,M.Si)

Lampiran :